PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI PENGANGGARAN, PENGAWASAN, DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1

Disusun Oleh:
Isnaeni Nurkhasanah
NIM 15.0102.0083

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI PENGANGGARAN, PENGAWASAN, DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh :
Isnaeni Nurkhasanah
NIM. 15.0102.0083

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI PENGANGGARAN, PENGAWASAN, DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Empiris pada desa se-Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Isnaeni Nurkhasanah

NPM **15.0102.0083**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal **27 Juli 2019**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Nur LailaYuliani, S.E., M.Sc., Ak

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Siti Noor Khikmah, SE., M.Si., Ak

Ketua

Nur LailaYuliani, S.E., M.Sc., Ak

Sekretaris

Faqiatul Mariya Waharini, SE., M.Si

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal 19 AUG 2019

Dra. Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Isnaeni Nurkhasanah
NIM	: 15.0102.0083
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI PENGANGGARAN, PENGAWASAN, DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelas kesarjanaanya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 21 Juli 2019

Hormat Penyataan

Isnaeni Nurkhasanah

NIM. 15.0102.0083

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Isnaeni Nurkhasanah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Temanggung, 30 Mei 1997
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat Rumah	: Dusun Mlobo Rt 02/ Rw 03, Desa Karangwuni, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung 56272
Alamat Email	: Isnaeninurkhasanah3005@gmail.com
Pendidikan Formal	:
Sekolah Dasar (2003-2009)	: SDN 1 Karangwuni
SMP (2009-2012)	: SMPN 1 Pringsurat
SMA (2012-2015)	: SMK 17 Kota Magelang
Perguruan Tinggi (2015-2019)	: S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendidikan Non Formal

- *Basic Listening* dan *Speaking Course* di UMMagelang *Language Center*
- Pelatihan Dasar Keterampilan Komputer di UPT Pusat Komputer UMMagelang

Pengalaman Organisasi

- *The Telkomsel Apprentice Program Batch* II (2018-2019) Magelang
- Bendahara Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB UMMagelang (2017-2018)
- Relawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sekolah Wirausaha (SEWIRA) Masa Bakti Tahun 2017 Magelang
- Anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) FEB UMMagelang (2016-2017)
- Anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) FEB UMMagelang (2015-2016)

Magelang, 21 Juli 2019

Isnaeni Nurkhasanah
15.0102.0083

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman. Jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beeserta orang-orang yang sabar"
(QS. Al Baqarah : 153)

"Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri"
(Qs. Al Ankabut : 6)

"Betapa aku senang, jika semua ilmu yang aku ketahui dimengerti oleh semua orang, maka dengannya aku mendapat pahala, meskipun mereka tidak memujiku"
(Imam Syafi'i)

"Tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkan kakimu di atas kepalamu. Untuk mencapai Tuhan, injak-injaklah pikiran dan kesombongan rasionalmu"
(Sujiwo Tejo)

"Aku Berpikir, Maka Aku Ada"
(Rene Descartes)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **"PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLGI INFORMASI, PARTISIPASI PENGANGGARAN, PENGAWASAN, DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat)."** Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berikut adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E, M.Sc, selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada saya.
3. Orang tua tercinta, Bapak Supandi dan Ibu Uswatun Khasanah yang telah memberikan dukungan moril dan materi, Kakak saya tercinta, Achmad Affan yang juga selalu mendukung baik secara moril maupun materi, dan adek saya tercinta, Muhammad Fatkhurrohman yang telah turut membantu kelancaran studi saya.
4. Ibu Sri Widarti selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Pringsurat yang selalu membantu dan mendukung kelancaran studi saya.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Magelang, 21 Juli 2019

Isnaeni Nurkhasanah
15.0102.0083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
RIWAYAT HIDUP iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK x
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAK xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Kontribusi Penelitian 13
E. Sistematika Pembahasan 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 15
A. Telaah Teori 15
1. Teori *Agency* 15
2. Akuntabilitas 17
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia 19
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi 20
5. Partisipasi Penganggaran 21
6. Pengawasan 22
7. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa 24
B. Telaah Penelitian Sebelumnya 25
C. Perumusan Hipotesis 28
D. Model penelitian 36
BAB III METODA PENELITIAN 38
A. Populasi dan Sampel 38
B. Teknik Pengambilan Sampel 38
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 39
D. Alat Analisis Data 41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 48
A. Statistik Deskriptif Data 48
B. Statistik Deskriptif Responden 48

C. Statistik Deskriptif Variabel 50
D. Uji Kualitas Data 52
E. Uji Hipotesis 55
F. Pembahasan 61
BAB V KESIMPULAN 72
A. Kesimpulan 72
B. Keterbatasan Penelitian 72
C. Saran 73
Daftar Pustaka 74
Lampiran 78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Dana Desa Kabupaten Temanggung	6
Tabel 1.2	Rincian Dana Desa dan Realisasi Kecamatan Pringsurat 2018	8
Tabel 2.1	Rekapitulasi Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1	Definisi dan Pengukuran Variabel	40
Tabel 4.1	Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	48
Tabel 4.2	Profil Responden	49
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	50
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas	53
Tabel 4.5	*Cross Loading*	53
Tabel 4.6	Pengujian Reliabilitas	55
Tabel 4.7	Koefisien Regresi	56
Tabel 4.8	Uji R^2	56
Tabel 4.9	Uji F	57
Tabel 4.10	Uji t	57

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Gambar 2.1	Model Penelitian	37
Gambar 3.1	Penerimaan Uji F	46
Gambar 3.2	Penerimaan Uji t	47
Gambar 4.1	Penerimaan Hipotesis Uji F	58
Gambar 4.2	Penerimaan Hipotesis Kompetensi Sumber Daya Manusia	59
Gambar 4.3	Penerimaan Hipotesis Pemanfaatan Teknologi Informasi	59
Gambar 4.4	Penerimaan Hipotesis Partisipasi Penganggaran	60
Gambar 4.5	Penerimaan Hipotesis Pengawasan	60
Gambar 4.6	Penerimaan Hipotesis Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuisioner penelitian	78
Lampiran 2	Daftar sampel	85
Lampiran 3	Daftar responden	86
Lampiran 4	Tabulasi Hasil Kuesioner	87
Lampiran 5	Tabulasi Hasil Kuisioner Yang Diolah	93
Lampiran 6	Tabel *Cross Loading*	99
Lampiran 7	Statistik Deskriptif	100
Lampiran 8	Uji Validitas	101
Lampiran 9	Uji Reliabilitas	107
Lampiran 10	Uji Regresi	109
Lampiran 11	Daftar Penerimaan dan Pengambilan Kuesioner	110
Lamiran 12	Surat Ijin Riset	112

ABSTRAK

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI PENGANGGARAN, PENGAWASAN, DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Pringsurat)

Oleh :

Isnaeni Nurkhasanah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan, dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se-kecamatan Pringsurat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 14 Desa se-Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Berdasarkan kriteria yang diterapkan untuk sampel yang dapat diolah dalam penelitian ini adalah 98 responden. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji-F, uji-t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci : ***Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa***

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa betujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang sangat kompleks di desa menjadi alasan bagi desa untuk berkembang.Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Pasal 71 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai keuangan Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan desa, salah satunya adalah Dana Desa. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka setiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

Dana Desa di setiap desa di Indonesia diberikan setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Penggunaan

Alokasi Dana Desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten selaku pemberi dana untuk memonitor jalannya pembangunan di desa.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah (*principal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh agent agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan. Untuk menginvestigasi secara komprehensif faktor-faktor yang dapat menentukan tingkat akuntabilitas Dana Desa menggunakan *accountability framework* yang dikembangkan oleh Iyoha dan Oyerinde (2009). Dalam *accountability framework*, faktor individu dan sistem yang diterapkan dalam sebuah pemerintahan menjadi fokus penting dalam meningkatkan akuntabilitas.

Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan maksimal. Kompetensi aparatur di pemerintah desa tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelola dana desa yang tergolong besar. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa

pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Faktor kedua dalam mendukung akuntabilitas adalah pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informais diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Penggunaan teknologi informasi berupa komputen membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan.

Faktor ketiga yaitu partisipasi penganggaran. Partisipasi penganggaran merupakan faktor yang menentukan kegiatan organisasi berjalan secara lebih efektif dan efisien. Partisipasi penganggaran berfungsi sebagai pengendlaian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan. Faktor keempat yaitu pengawasan. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah (Anggraeni, 2014).

Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu komitmen organisasi pemerintah desa. Sumber daya manusia suatu organisasi atau pemerintah yang bagus tidak akan berjalan secara maksimal dalam mewujudkan akuntabilitas yang baik tanpa adanya komitmen organisasi di dalamnya. Komitmen

organisasi yang menjadi tolok ukur sejauh mana aparat pemerintah desa memihak pada suatu organisasi tertentu serta untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. Dengan komitmen organisasi yang kuat maka hal itu akan mempengaruhi aparat pemerintah desa untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang ditentukan, komitmen yang tinggi juga dapat menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadinya dan berusahan untuk membentuk organisasi yang baik sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan data yang dirilis dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tentang praktik penyalahgunaan dana desa sejak tahun 2015-2018 telah di temukan 181 kasus dengan setidaknya 184 tersangka dan kerugian mencapai 40,6 miliar, dimana setiap tahunnya kasus penyalahgunaan dana desa tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari kasus tersebut, terdapat 141 kasus pelakunya merupakan Kepala Desa (Https://antikorupsi.org). Selanjutnya, berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia serta KPK menunjukkan maraknya penyalahgunaan dana desa. Kementerian Desa telah menerima 200 laporan pelanggaran administrasi dari 600 laporan dugaan penyelewengan dana desa, dan sebanyak 60 laporan di antaranya telah diserahkan ke KPK. Kasus korupsi di tingkat desa berdasarkan hasil temuan LSM Jaringan Paralel Indonesia (JPI) sebagian bukan karena niat kejahatan perangkat desa melainkan karena ketidakpahaman para perangkat desa dalam memanfaatkan

anggaran dan ketidakefektifitas pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu juga disebabkan karena minimnya kontrol dari pemerintah dan masyarakat.

Pada tahun 2015-2018 terdapat kasus-kasus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Temanggung sebanyak 11 kasus yang diproses secara hukum oleh kepolisian dan kejaksaan negeri di Kabupaten Temanggung. Penyalahgunaan dana desa tersebut antara lain seperti kegiatan fiktif, *mark up* harga, *mark up* jumlah, belanja fiktif, tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan, dan penggunaan untuk keperluan pribadi atau golongan. Selain itu, terdapat beberapa desa di Kabupaten Temanggung yang diperiksa Kejaksaan karena tidak bisa mempertanggungjawabkan laporan keuangan dana desanya salah satunya di Desa Rejosari Kecamatan Pringsurat. (**temanggungkab.go.id**).

Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan dengan 266 desa dan semuanya mendapatkan dana desa. Kecamatan Pringsurat merupakan kategori 5 besar Kecamatan di Kabupaten Temanggung yang mendapat dana desa. Diantara ke-5 Kecamatan yang mendapatkan dana desa dengan jumlah terbanyak tersebut 4 Kecamatan lainnya seperti Kecamatan Ngadirejo, Bulu, Kandangan, dan Kaloran sudah cukup baik dalam melaporkan penggunaan dana desanya, ini dibuktikan dengan ketepatan dalam pelaporan dana desa dan realisasi anggaran dana desa yang sudah maksimal. Desa Dlimoyo Kecamatan Ngadirejo merupakan salah satu percontohan desa terbaik dalam mengelola dana desanya diikuti dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Ngadirejo. Di

bawah ini rincian dana desa per kecamatan di Kabupaten Temanggung tahun 2018 :

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Besaran Dana
1.	Ngadirejo	15.168.039.000
2.	Bulu	14.949.641.000
3.	Kandangan	13.431.439.000
4.	Kaloran	12.375.177.000
5.	**Pringsurat**	**11.772.321.000**
6.	Candiroto	11.658.955.000
7.	Kedu	11.104.287.000
8.	Bejen	11.088.634.000
9.	Tembarak	10.862.350.000
10.	Parakan	10.514.549.000
11.	Wonoboyo	10.216.431.000
12.	Jumo	10.080.831.000
13.	Kledung	9.845.672.000
14.	Selopampang	9.509.672.000
15.	Kranggan	9.449.014.000
16.	Bansari	9.415.270.000
17.	Tlogomulyo	9.339.536.000
18.	Tretep	9.240.163.000
19.	Gemawang	8.616.907.000
20.	Temanggung	4.403.744.000
Jumlah		**213.042.614.000**

Sumber : Peraturan Bupati Temanggung nomor 8 tahun 2018

Berdasarkan data dari bagian tata usaha dan umum di Kecamatan Pringsurat, tingkat pendidikan Perangkat Desa di Kecamatan Pringsurat rata-rata lulusan SMP sederajat sejumlah 45,91% dari jumlah perangkat desa menjadi alasan bagi masing-masing Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya belum maksimal dengan tugasnya karena ketidakmauan dan ketidakmampuan menjalankan tugas. Oleh karena itu, untuk mengimbangi teknologi yang semakin maju Kecamatan Pringsurat sudah mengadakan pelatihan untuk Perangkat Desa sebanyak 3 kali dalam satu tahun. Akan tetapi,

karena banyaknya Perangkat Desa yang berlatang belakang pendidikan SMP menjadi alasan pelatihan tersebut tidak berjalan dengan baik dan maksimal. Hal itu mengakibatkan laporan dana desa yang harus di buat oleh desa jadi terlambat, sehingga proses pencairan dana desa di Kecamatan Pringsurat yang seharusnya sudah dapat di cairkan jadi terhambat karena terdapat beberapa desa yang belum tertib dalam melaporkan syarat-syarat pencairan dana desa. Di Kecamatan Pringsurat desa-desa yang terlambat melaporkan syarat-syarat untuk pencairan dana desa adalah Desa Ngipik, Soborejo, Wonokerso, Pagergunung, Nglorog, Klepu, Karangwuni, Kebumen, Pringsurat, dan Soropadan. Sementara, hanya beberapa desa saja yang sudah tertib melaporkan syarat-syarat pencairan dana desa seperti Desa Kupen, Gowak, Pingit, dan Rejosari..

Desa Ngipik merupakan salah satu desa di Kecamatan Pringsurat dengan kondisi keterbatasan sarana dan prasarana fisik dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2015, pengelolaan dana desa di Desa Ngipik tidak direalisasikan untuk pembangunan apapun dikarenakan ada gangguan faktor alam dan pada akhir 2015 terjadi pergantian kepala desa dan baru disahkan pada pertengahan tahun 2016. Pembangunan dan pengelolaan dana desa tahun 2015 baru digunakan pada tahun 2016 . Oleh karena itu, menurut kepala desa Ngipik sampai tahun 2018 masih termasuk kedalam desa tertinggal karena tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa masih sangat kurang dan pengelolaan alokasi dana desanya tergolong rendah.

Terdapat 14 desa di Kecamatan Pringsurat dan semuanya mendapat dana desa. Beberapa desa di Kecamatan Pringsurat masih belum maksimal dalam menggunakan dana desa yang di peroleh dari pemerintah, seperti Desa Kebumen, Karangwuni, Klepu, Nglorog, Pagergunung, dan Wonokerso. Hal itu disebabkan karena kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lainnya yang sudah direncanakan sampai akhir tahun belum sepenuhnya dapat direalisasikan dan akan di realisasikan pada tahun berikutnya. Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh dan realisasinya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Rincian Dana Desa dan Realisasi tahun 2018

No	Desa	Anggaran	Realisasi	Selisih
1.	Pringsurat	764.491.000	754.680.500	9.810.000
2.	Kebumen	793.028.000	317.211.200	475.816.000
3.	Soropadan	779.927.000	778.927.000	1.000.000
4.	Kupen	816.066.000	811.978.000	4.088.000
5.	Karangwuni	825.910.000	672.152.880	153.757.120
6.	Gowak	974.530.000	973.630.000	900.000
7.	Rejosari	760.631.000	760.631.000	-
8.	Pingit	820.862.000	820.862.000	-
9.	Klepu	800.451.000	690.5810.600	109.869.400
10.	Nglorog	955.966.000	801.530.000.	154.436.000
11.	Pagergunung	757.867.000	586.023.400	171.843.600
12.	Wonokerso	940.890.000	722.196.000	218.694.000
13.	Soborejo	993.606.000	981.472.222	11.623.778
14.	Ngipik	788.096.000	771.856.000	16.240.000
	Total	**11.772.321.000**	**10.444.313.102**	**1.328.007.898**

Sumber : Peraturan Bupati Temanggung nomor 8 tahun 2018

Penelitian yang dilakukan oleh Seprizal (2015) tentang pengaruh sistem pengendalian internal, sumber daya manusia bidang akuntansi, dan

pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menyatakan bahwa variabel pengendalian internal dan sumber daya manusia bidang akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) tentang analisis faktor kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menyatakan bahwa seluruh variabel penelitian berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut di perkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama, dkk (2017) tentang pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa menyatakan bahwa kompetensi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

Menurut penelitian Mada,dkk (2017) tentang pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut di perkuat dengan penelitian dari Alminanda, dan Marfuah (2018) tentang peran komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya

manusia, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini adalah variabel kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan interaksi variabel kompetensi sumber daya manusia dengan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, Aulia, dkk (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfataan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten 50 kota. Hasil dari penelitian tersebut adalah seluruh variabel penelitian berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian Perdana, dkk (2018) tentang pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini adalah variabel kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bantul. Hasil tersebut di perkuat dengan penelitian dari Sapartiningsih, dkk (2018) yang melakukan penelitian tentang Analisis

Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil dari penelitian tersebut adalah kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang telah dilakukan oleh Sapartiningsih, dkk (2018) dengan persamaan menggunakan keseluruhan variabel. Sedangkan perbedaanya yang terdiri dari **Pertama**, menambahkan variabel **Komitmen Organisasi Pemerintah Desa** karena sumber daya manusia suatu organisasi atau pemerintah yang bagus tidak akan berjalan secara maksimal dalam mewujudkan akuntabilitas yang baik tanpa adanya komitmen organisasi di dalamnya. Komitmen organisasi yang menjadi tolok ukur sejauh mana aparat pemerintah desa memihak pada suatu organisasi tertentu serta untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. Komitmen organisasi yang kuat maka hal itu akan mempengaruhi aparat pemerintah desa untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang ditentukan, komitmen yang tinggi juga dapat menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadinya dan berusahan untuk membentuk organisasi yang baik sesuai yang diharapkan (Mada, dkk (2017).

Kedua, objek pada penelitian ini yaitu Kecamatan Pringsurat karena Kecamatan Pringsurat merupakan daerah yang mendapatkan alokasi dana desa dalam kategori 5 besar di Kabupaten Temanggung, diantara ke-5 Kecamatan yang mendapatkan dana desa dengan jumlah terbanyak tersebut 4 Kecamatan

lainnya sudah cukup baik dalam melaporkan penggunaan dana desanya, selain itu Desa Dlimoyo Kecamatan Ngadirejo merupakan salah satu percontohan desa terbaik dalam mengelola dana desanya diikuti dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Ngadirejo. Selain itu terdapat salah satu desa di Kecamatan Pringsurat yaitu Desa Ngipik yang masih tergolong desa tertinggal dan tingkat pendidikan Perangkat Desa di Kecamatan Pringsurat masih tergolong rendah sehingga masing-masing Perangkat Desa belum melakukan tanggungjawab pekerjaan sesuai dengan tugasnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi peran pemerintah desa
2. Manfaat praktis
   a. Bagi pemerintah, bahwa penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk mewujudkan *good government* dan *good governance*.
   b. Bagi pemerintah desa di Kecamatan Pringsurat , penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam pemerintah.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori *Agency*

Teori keagenan (*agency)* adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan agen. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang *(principal)* dan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agen. Hal tersebut terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Upaya untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan *(agency cost)* yang akan ditanggung baik oleh prinsipal maupun agen. Teori yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost, bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditangung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan

yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal.

Adanya tujuan yang berbeda antara *principal* dan *agent* akan menimbulkan masalah keagenan. Menurut Fama dan Jensen (1983), masalah agensi dikendalikan oleh sistem pengambilan keputusan yang memisahkan fungsi manajemen dan fungsi pengawasan. Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *Agency theory*. Diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Abdullah, 2005).

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah desa sebagai *agent* bagi masyarakat *(principal)* akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah desa tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information* asymmetry antara pihak *agent* (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya permasalahan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Keterkaitan dengan adanya teori agensi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pengelolaan dana desa, dimana pemerintah desa disini bertindak sebagai pihak yang diberi amanah *(agent)* untuk menyajikan laporan terkait dengan pengelolaan dana desa yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa diharapkan mampu melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi mengelola keuangan dana desa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan transaparan dan akuntabel. Akuntabilitas dan transparansi mensyaratkan bahwa mereka yang memegang posisi kepercayan publik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan menyediakan informasi secara terbuka mengenai laporan pengelolaan dana desa. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa ini artinya information *asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan terjadinya permasalahan pada pengelolaan dana desa juga menjadi lebih kecil.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/*agen*/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam pertanggungjawaban Dana Desa, kepala desa memiliki peran sebagai ketua tim pelaksana yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, hingga pelaksanaan dan pengawasannya (Mardiasmo, 2010).

Pengelolaan keuangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksananya, kepala desa adalah

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa Pasal 75 ayat (2). Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Ada pula asas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

a) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

d) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Abdul (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuansumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Upaya untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi harus memiliki daya kompetensi yang tinggi. Kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevei, 2005).

Menurut Blanchard & Thicker (2004), *skill* seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, dan menglimpementasikan suatu strategi bisnis. Seperti yang sudah disinggung bahwa kapasitas administrasi dari tata kelola aparat pemerintah desa masih

minim khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan di 78.000 desa yang ada.

Maka sebaiknya proses penyusunan laporan keuangan desa terutama dalam implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini juga harus merupakan tanggung jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Dengan demikian, seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke desa khususnya yang berkaitan di bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumber daya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumber daya yang lebih banyak yakni para perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih mudah dikerjakan.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Wilkinson (2000), pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi sangat membantu manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk menjalankan sistem informasi komputer yang terintegrasi yang didesain untuk menyediakan data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sumber daya manusia.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi

sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

5. Partisipasi Penganggaran

Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah desa dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya. Partisipasi anggaran adalah proses dimana bawahan atau pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dalam dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi manajer dalam proses penganggaran mengarah kepada seberapa besar tingkat keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran (Nurhayati, 2012).

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu angaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik penganggaran merupakan suatu proses politik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan

suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan mendatang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang (Mardiasmo,2009:61)

Menurut Sujarweni (2015: 29) partisipasi penganggaran adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

6. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah di tentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif

dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan (Anggraeni, 2014: 7).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja yang sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Penyelenggaran pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis pengawasan yaitu: pengawasan dari segi waktunya pengawasan dari segi sifatnya. Pengawasan di tinjau dari segi waktunya dibagi dalam 2(dua) kategori yaitu sebagai berikut:

a. Pengawasan a-priori atau pengawasan preventif yaitu pengawasn yang dilakuakan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan keputusan dari aparatur aparatur yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan administrasi Negara atau peraturan lainnya dengan cara pengesahan terhadap ketetapan atau peraturan tersebut. Apabila ketetapan atau peraturan tersebut belum di sah kan maka ketetapan atau peraturan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum.

b. Pengawasan a-pasteriori atau pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang lebih tinggi terhadap keputusan aparatur pemerintah yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya tindakan pemerintah. Tindakan dalam pengawasan resensif 44 dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Dalam keadaan yang mendesak tindakan dapat dilakukan dengan cara menangguhkan ketetapan yang telah dikeluarkan sebelum dilakukan pencabutan.

7. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Komitmen organisasi pemerintah desa adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi pemerintah desa sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi pemerintah desa dibandingkan dengan kepentingan sendiri . Komitmen organisasi yang menjadi tolok ukur sejauh mana aparat pemerintah daerah memihak pada suatu organisasi tertentu serta untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. Memberikan pekerjaan individu yang nilainya tidak selaras dengan nilai dalam organisasi yang ada, maka akan cenderung menghasilkan karyawan yang kurang memiliki motivasi dan komitmen, serta yang tidak terpuaskan oleh pekerjaan mereka dan oleh organisasi tersebut (Sumarno, 2005).

Komitmen organisasi pemerintah desa yang kuat akan mempengaruhi aparat pemerintah desa untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Selain itu, komitmen yang tinggi juga dapat menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadinya dan berusaha untuk membentuk organisasi yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Sebaliknya, jika komitmen organisasi pemerintah desa tersebut rendah akan membuat individu berbuat untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, jika kompetensi sumber daya manusia pemerintah desa tersebut bagus, tetapi tidak mempunyai komitmen organisasi yang kuat, maka tujuan organisasi tersebut tidak akan tercapai.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1.	Diani, (2014)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Pariaman
2.	Seprizal (2015)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Sistem Pengendalian Internal dan Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan ADD dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan ADD

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
3.	Djalil, (2017)	The Effect Of Used Information Technology, Internal Control, And RegionalAccounting System On The Performance Of City Governance Agency Of Banda Aceh City, Indonesia	Pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal dan implementasi regionalsistem akuntansi keuangan memiliki pengaruh positif secara simultan yang signifikan terhadapkinerja badan pemerintah kota Banda Aceh.
4.	Mada, dkk (2017)	Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, & Partisipasi Masyaralat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa	Kompetensi pengelola dana desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa
5.	Sugiarti dan Yudianto (2017)	Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
6.	Widyatama, dkk (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Kompetensi berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), SPI berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas) Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD
7.	Sapartiningsih,dkk (2018)	Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi,`& Pengawasan Terhadap	Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, dan Pengawasan berpengaruh

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
8.	Widyanti, (2018)	Analisis Akuntabilitas dan Transpransi Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Tapakis	Akuntabilitas dan Transparansi sudah mengacu pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014
9.	Alminanda (2018)	Peran Komitmen Organisasi memoderasi Pengaruh Kompetensi SDM, SPI, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
10.	Perdana, dkk (2018)	Pengaruh Kompetensi SDM, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi, komitmen organisaasi pemerintah desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh negatif, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
11.	Yesinia,dkk (2018)	Analisis Faktor yang Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Peran Perangkat desa dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sumber : data penelitian terdahulu, 2018

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Abdul (2010) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Hubungan agensi muncul ketika *principal* memberikan amanah kepada *agent* dalam wewenang atas tanggung jawab sebagai bentuk pertanggungjawaban segala aktivitas yang dilakukan dan di pertanggungjawabkan kepihak *principal* sebagai pihak yang berwenang. Hubungan antara pihak *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan (*information asymmetry*) karena agen yang lebih banyak mengetahui informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang sebenarnya dibandingkan dengan principal. Upaya dalam mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang ditanggung oleh *principal* maupun *agent*, yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir asimetri informasi yang ada dengan cara *bonding*

cost. Jika perangkat desa itu paham atas akuntabilitas pengelolaan dana desa maka tidak akan terjadi penyelewengan anggaran oleh kepala desa maupun perangkat desa itu sendiri. Sehingga semakin tinggi kompetensi aparatur desa, akan semakin tinggi pula pemahamannya terhadap pengelolaan dana desa, dengan demikian pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel. Oleh karena itu dengan adanya pemahaman perangkat desa yang baik maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan baik juga.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyatama, dkk (2017), Alminanda, dan Marfuah (2018), dan Perdana (2018) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, penelitian yang telah dilakukan oleh Mada, dkk (2017), Makalalag (2017), dan Sapartiningsih, dkk (2018) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolan dana desa.

H1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Wilkinson (2000), pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan, electronic *commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Teknologi informasi sangat membantu manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk

menjalankan sistem informasi komputer yang terintegrasi yang didesain untuk menyediakan data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sumber daya manusia.

Teori Agensi menjelaskan ketika *principal* memberikan amanah kepada *agent* dalam wewenang atas tanggung jawab sebagai bentuk pertanggungjawaban segala aktivitas yang dilakukan dan di pertanggungjawabkan kepihak *principal* sebagai pihak yang berwenang. Hubungan antara pihak *principal* dan *agent* di dalam teori agensi, dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan (*information asymmetry*) karena agen yang lebih banyak mengetahui informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang sebenarnya dibandingkan dengan principal. Upaya dalam mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang ditanggung oleh *principal* maupun *agent*, yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yaitu dengan cara *monitoring cost*. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik nantinya akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa

dengan cara proses penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah desa yang lebih cepat, akurat, dan tepat sehingga mengurangi kesalahan yang terjadi.

Penelitian dari Sefrizal (2015) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, beberapa penelitian dari Sugiarti, dan Yudianto (2017), Aulia, dkk (2018), Perdana, dkk (2018), dan Sapartiningsih, dkk (2018) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

3. Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Sujarweni, (2015) partisipasi penganggaran adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

Hubungan keagenan menunjukkan ketika *principal* memberikan amanah kepada *agent* dalam wewenang atas tanggung jawab sebagai bentuk pertanggungjawaban segala aktivitas yang dilakukan dan di pertanggungjawabkan kepihak *principal* sebagai pihak yang berwenang.

Hubungan antara pihak *principal* dan *agent* di dalam teori agensi, dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan (*information asymmetry*) karena agen yang lebih banyak mengetahui informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang sebenarnya dibandingkan dengan principal. Upaya dalam mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang ditanggung oleh *principal* maupun *agent*, yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*.

Partisipasi penganggaran merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yaitu dengan cara *monitoring cost*. Partisipasi penganggaran dalam pengelolaan alokasi dana desa berfungsi sebagai pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dapat membantu dan memonitoring pemerintahan desa dalam penyusunan anggaran. Sehingga apabila partisipasi penganggaran berjalan dengan efektif dan efisien maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desanya juga akan baik.

Penelitian dari Perdana (2018) membuktikan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti, dan Yudianto (2017), dan penelitian dari Sapartiningsih, dkk (2018) menunjukkan hasil

bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H3. Partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

4. Pengaruh PengawasanTerhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah di tentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjaminbahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan (Anggraeni, 2014).

Ketika *principal* memberikan amanah kepada *agent* dalam wewenang atas tanggung jawab sebagai bentuk pertanggungjawaban segala aktivitas yang dilakukan dan di pertanggungjawabkan kepihak *principal* sebagai pihak yang berwenang. Hubungan antara pihak *principal* dan *agent* di dalam teori agensi, dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan (*information asymmetry*) karena agen yang lebih banyak mengetahui informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang sebenarnya dibandingkan dengan principal. Upaya dalam mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini dapat menimbulkan biaya

keagenan (*agency cost*) yang ditanggung oleh *principal* maupun *agent*, yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*.

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yaitu dengan cara *monitoring cost*. melalui pengawasan dapat meminimalisir adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Bahkan, pengawasan juga dapat digunakan sebagai penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana aktivitas pengelolaan alokasi dana desa tersebut dilaksanakan. Sehingga apabila pengawasan pengelolaan alokasi dana desa dilakukan secara efektif dan efisien maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa akan baik.

Penelitian dari Alminanda (2018) membuktikan bahwa pengawasan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sapartiningsih, dkk (2018) membuktikan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H4. Pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

5. Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komitmen organisasi pemerintah desa adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi pemerintah desa sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi pemerintah desadibandingkan dengan kepentingan sendiri. Sesuai

dengan perannya sebagai agen yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada rakyat, maka komitmen organisasi yang tinggi akan berusaha dengan maksimal untuk mengelola keuangan desa secara akuntabel dan transparan. Demikian karena mereka sadar bahwa pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah, akan menjadi besar dan kuat atau sebaliknya menjadi lemah tidak berdaya yang keduanya tergantung pada cara pengelolaan keuangannya (Halim, 2012).

Berdasarkan teori agensi, ketika *principal* memberikan amanah kepada *agent* dalam wewenang atas tanggung jawab sebagai bentuk pertanggungjawaban segala aktivitas yang dilakukan dan di pertanggungjawabkan kepihak *principal* sebagai pihak yang berwenang. Hubungan antara pihak *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan (*information asymmetry*) karena agen yang lebih banyak mengetahui informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang sebenarnya dibandingkan dengan principal. Upaya dalam mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang ditanggung oleh *principal* maupun *agent*, yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*.

Komitmen organisasi pemerintah desa merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yaitu dengan cara *bonding cost*. Komitmen organisasi pemerintah desa yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi dan

berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Komitmen organisasi yang rendah akan membuat individu untuk berbuat untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, semakin tinggi komitmen organisasi pengelola dana desa, maka akan semakin tinggi pula tingkat rasa tanggungjawabnya sampai pada akhirnya akan melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel.

Beberapa penelitian dari Alminanda dan Marfuah, (2018) dan Perdana, dkk (2018) menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mada, dkk (2017), dan Aulia, dkk (2018) membuktikan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H5. Komitmen organisasi pemerintah desa positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Model Penelitian

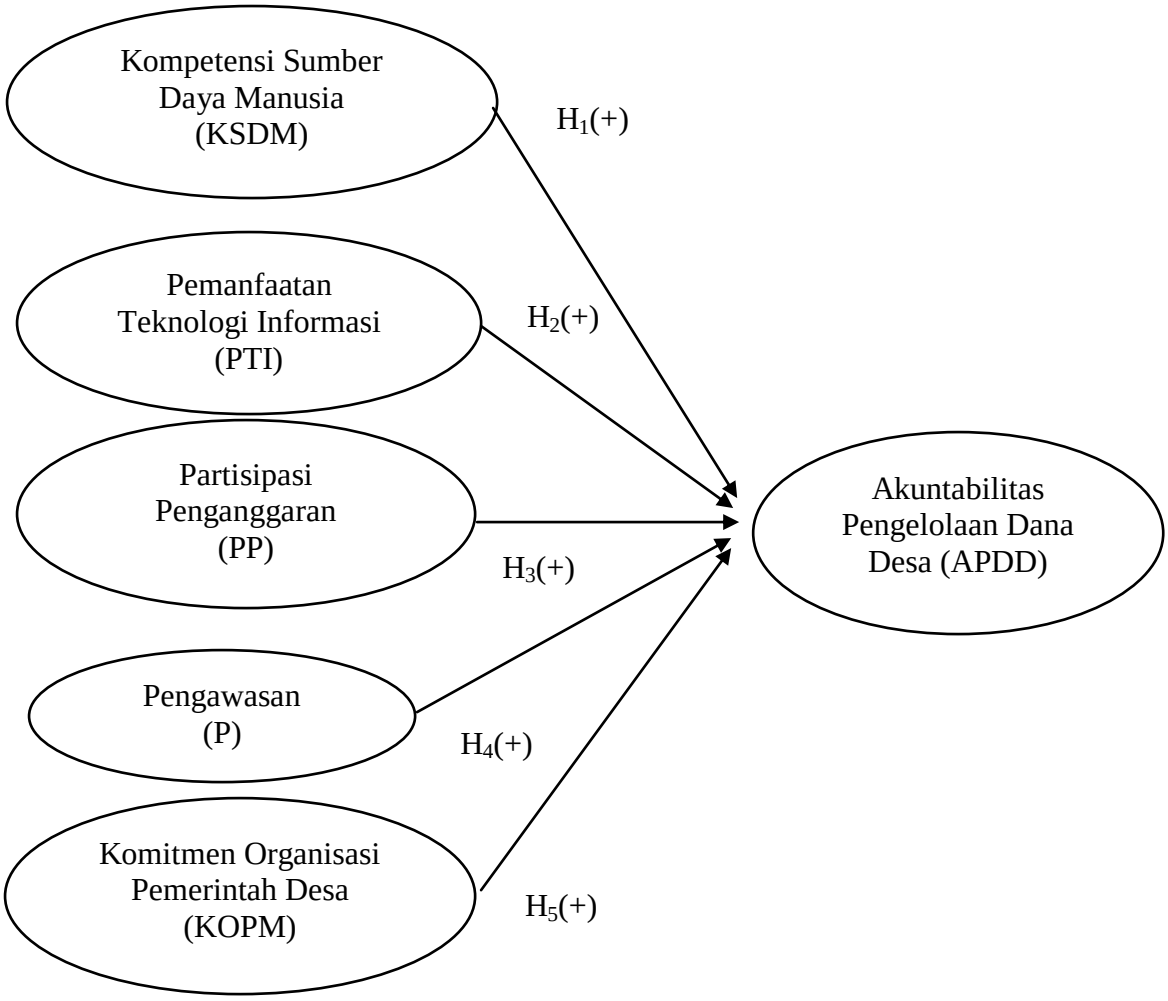

Gambar 2.1 Model Penelitian

BAB III
METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah atau komunitas yang terdiri atas objek/subjek yang dimiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012;23). Populasi dalam penelitian ini adalah desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Pringsurat.

Sampel adalah sebagian dari populasi, dan sampel yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2006;33). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan, kasi pelayanan, kasi perencanaa, dan kasi kesra dengan alasan pihak-pihak tersebut yang bertanggungjawab dan terlibat langsung dengan pengelolaan dana desa.
b) Memiliki masa kerja minimal 2 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMP sederajat dengan alasan sebagian besar perangkat desa di Kecamatan Pringsurat adalah lulusan SMP sederajat.

B. Teknik Pengambilan Sampel

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, teencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sekaran, (2006) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Adapun pengertian deskriptif menurut Sekaran, (2006) adalah metode yang diteliti melalui data atau sampel yang telah tekumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

2. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survey, yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung diberikan kepada kriteria responden di desa se-Kecamatan Pringsurat. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak diserakan dalam analisis. Peneliti memiih cara

demikian dengan pertimbangan bahwa metode survei langsung lebih efektif dan mengurangi risiko tidak kembalinya kuesioner yang telah di sebar.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Dependen		
1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatannya terkait dengan pengelolaan dana desa.	Menggunakan 5 pernyataan yang mengacu pada penelitian Mada, dkk (2017) dengan indikator: 1. Kejujuran dan keterbukaan informasi 2. Kepatuhan dalam pelaporan 3. Kesesuaian prosedur 4. Kecukupan informasi 5. Ketepatan penyampaian laporan Yang diukur dengan skala likert 5 poin.
Variabel Independen		
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)	Kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Kharis, 2010)	Menggunakan 7 pernyataan yang mengacu pada penelitian Mahardini dan Miranti (2018) dengan indikator: 1. Pendidikan 2. Tanggungjawab 3. Pengalaman 4. Pelatihan Yang diukur dengan skala likert 5 poin.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)	Penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak, database, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi	Menggunakan 5 pernyataan yang mengacu pada penelitian Sapartiningsih, dkk (2018) dengan indikator: 1. Proses akuntansi secara komputerisasi 2. Laporan akuntansi dan manajerial yang

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Independen		
	(Wilkinson,et al2000)	terintegrasi 3. Kemampuan pegawai dalam mengoperasikan komputer. 4. Kemampuan pegawai dalam memanfaatkan keunggulan komputer Yang diukur dengan skala likert 5 poin.
Partisipasi Penganggaran (PP)	Prinsip dimana bahwa setiap warga desa padadesa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal.(Sujarweni, 2015)	Menggunakan 5 pernyataan yang mengacu pada penelitian Sapartiningsih, dkk (2018) dengan indikator : 1. Peranan masyarakat terhadap penyusunan APBDes 2. Peran Perangkat Desa dalam penyusunan APBDes 3. Interaksi kepala desa dengan masyarakat dalam penyusunan APBDes 4. Memiliki pengaruh dalam penyusunan APBDes 5. Memiliki kontribusi dalam penyusunan APBDes Yang diukur dengan skala likert 5 poin
4. Pengawasan(P)	Tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan pemerintah desa untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan recana yang ditetapkan sebelumnya dan	Menggunakan 5 pernyataan yang mengacu pada penelitian Sapartiningsih, dkk (2018) dengan indikator : a. Pengawasan penggunaan APBDes b. Pengawasanmasyarakat c. Pengawasan secara

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel
(Lanjutan)

Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Independen		
	melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. (Sapartiningsih, dkk 2018)	internal dan eksternal. d. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa e. Pengawasan secara preventif dan reprentif. Yang dukur dengan skala likert 5 poin.
5. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (KOPD)	Kekuatan yang bersifat relatif dari perangkat desa dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi desa (Nurhayati, 2012)	Menggunakan 6 pernyataan yang mengacu penelitian Mada, dkk (2018) dengan indikator: a. Keyakinan terhadap tujuan organisasi b. Perasaan memiliki organisasi c. Mempertahankan keanggotaan organisasi d. Kesetiaan organisasi e. Kesediaan mengerahkan upaya atas nama organisasi Yang dikukur dengan skala likert 5 poin.

D. Alat Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian (nama responden, jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan,dan lama masa kerja). Penelitian juga menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari *mean*, standar deviasi, minimun dan maksimum (Ghozali, 2018;19).

2. Uji Kualitas data

a. Uji Validitas

Uji Validitas di gunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner di katakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018;51). Menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory* Factor *Analysis (CFA*). *Confirmatory Factor Analysis* di gunakan untuk menguji suatu variabel mempunyai *unidimensionalitas* atau apakah indikato-indikator yang di gunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. *Confirmatory Factor Analysis* dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut.

Confirmatory Factor Analysis akan mengelompokkan *masing*-masing indikator ke dalam beberapa faktor indikator yang di gunakan merupakan indikator konstruk, kemudian akan mengelompokan menjadi satu dengan faktor loading yang tinggi. Ketika pada pengelompokan terdapat kesulitan dalam menginterprestasikan maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interprestasi faktor adalah *factor rotation*. Rotasi ortogonal melakukan rotasi dengan sudut 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Rotasi orthogonal dapat berbentuk *Quartimax,Varimax dan Promax* (Ghozali, 2018-55).

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki kolerasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Bartlett of Sphericity* merupakan uji statistik untuk

menentukan ada tidaknya kolerasi antar variabel. Semakin besar *sampel*menyebabkan *Bartlett test* semakin sennsitif untuk mendeteksi adanya kolerasi antara variabel. Alat uji lain yang di gunakan untuk mengukur tingkat *interkolerasi* antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser Meyer Oikin Measure of SamplingAdequecy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus > 0,50 dan *cross loading* > 0,50 untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2018;57).

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha* (a) lebih besar dari 0,70 atau 70% (Ghozali, 2018;45-46).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda yang diformulasikan sebagai berikut :

APDD = a + B_1 KSDM + B_2 PTI + B_3 PP +B_4 P + B_5 KOPD e

Ket :

APDP = Akuntansi Pengelolaan Dana Desa

KSDM = Kompetensi Sumber Daya Manusia

PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi

PP = Partisipasi Penganggaran

P = Pengawasan

KOPD = Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

a = nilai intersep (konstanta)

B_{12345} = Koefisien regresi

E = error (tingkat kesalahan)

4. Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinasi R^2

Menurut Ghozali (2018: 97), Koefisien determinasi R^2 untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah nol sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

b. Uji F *(Goodness of Fit)*

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir suatu nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak (Ghozali, 2018;98). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikan 5% dengan derajat kebebasan pemilang df = k dan derajat kebebasan penyebut (df) =

n-k-1 dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $P_{value} < \alpha = 0{,}05$, maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $P_{value} > \alpha = 0{,}05$, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak *fit*).

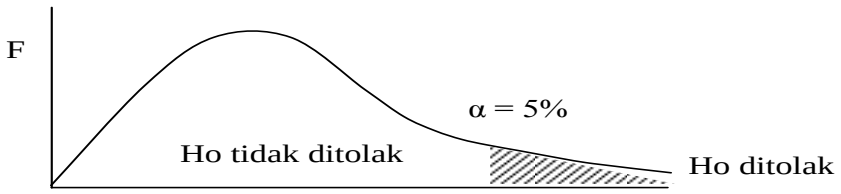

Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

c. Uji Statistik t (t-test)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dengan t_{tabel} (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan df = n-1 (Ghozali, 2018;99)

1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau P *value*$< \alpha = 0{,}05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau P *value*> α = 0,05, maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

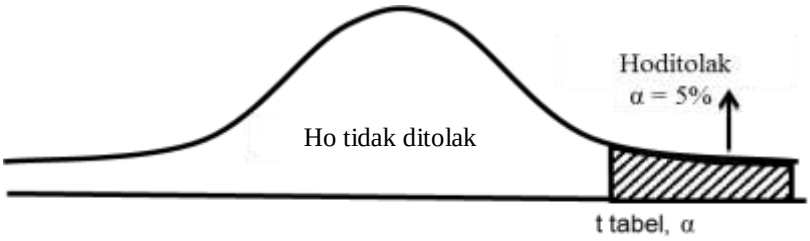

Gambar 3.2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan, dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se-Kecamatan Pringsurat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 98 aparat desa yang mengelola dana desa yang terdiri dari kepada kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan keuangan, kasi pemerintahan, kasi pelayanan, dan kasi kesra.

Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Penganggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan, tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sampel yang digunakan baru desa se-Kecamatan Pringsurat yang berjumlah 14 desa, sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasi di desa di Kabupaten Temanggung.

2. Penelitian ini juga mempunyai keterbatasan variabel dimana variabel yang diteliti hanya kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan, dan komitmen organisasi pemerintah desa. Sedangkan masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya seluruh desa se-Kabupaten Temanggung serta perlu dilakukan penelitian ulang dengan aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel yang diduga dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, misalnya seperti standar akuntansi pemerintah, gaya kepemimpinan,dan ketaatan pelaporan keuangan desa.

Daftar Pustaka

Abdul, Kharis .(2010). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pada PT. AVIA AVIAN. *Tesis*. Jawa Timur: Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional.

Alminanda, P. dan M. (2018). Peran Komitmen Organisasi dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, *16*(2).

Anggraeni, D. T. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmu Riset Akuntansi*, *3*(3), 1–16.

Aulia, Putri, Restu Agusti, dan J. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, *1*(1).

Blanchard, N., Thacker, j.W.(2004).*Effective Training: Systems, Strategies, and Practices (5 Edition)*. New Jersey : Pearson Education International.

Dewi, Retno Astuti. (2016). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3 (06) 311-327.

Djalil, Muslim A. (2017). The Effect of Used Information Technology, Internal Control, and Regional accounting System on the Performance of City Governance Agency of Banda Aceh City, Indonesia. *Board Research in Accounting, Negotiation, and Distribution,* 08.

Diani, Dian Irma. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 02 (01)

Ferina, Ika Sasti. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 14 (03).321-336.

Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Hevei, G. A. (2005). *Standards for Internal Control in New York State Goverment*.

Hidayah, Nurul, dan Iin Wijayanti. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 02; 2628-6145.

http://www.temanggungkab.go.id (Diakses pada 18 Maret 2019)

Indonesia Corruption Watch. 2018, (http://www.antikorupsi.org), diakses 18 Maret 2019.

Iyoha, F.O., dan D. Oyerinde. (2009). Acconting Infrastructure and Accountability in the management of Public Expenditure in Developing Countries: A Focus on Nigeria. *Critical Perspective on Accounting*21: 361-373.

Jensen, M. C dan Mecling, W.H. (1976). Theoryof the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, 3 (04), 305-360

Kharis, A. (2010). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pada PT. AVIA AVIAN*. Universitas Pembangunan Nasional.

Mada, Sarifudin, Lintje Kalangi, dan H. G. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"8*(2).

Makalalag, Astri Juainita. (2017).Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill*", 8 (01)149-158.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.

Nurhayati, F. (2012). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Slack Anggaran Dengan Informasi Asimetris Sebagai Moderating Variable (Studi Pada Pemda Kabupaten Sleman). Skripsi. Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer ke Desa Kabupaten Temanggung tahun 2018.

Perdana, Khaeril Wahyu, dan P. S. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul *Jurnal Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

Pratiwi, Umi dan Permata Ulfah. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(429-440).

Sapartiningsih, Dwi, Suharno, dan D. K. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, *14*, 100–114.

Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. jakarta: Salemba Empat.

Seprizal. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, *02*(02).

Setiana, Novindra Dwi dan Nur Laila Yuliani. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *The 6th University Research Colloquium Universitas Muhammadiyah Magelang.*

Subroto, Agus. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis*. Semarang : Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Sugiarti, E. dan I. Y. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Proceedings*, ISSN 2252-3936.

Sugiyono. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Supomo, B., dan Indriantoro, N. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.

Widyatama, Arif, Lola Novita, dan D. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *02*(02).

Wilkinson, J. W. et al. (2000). *Accounting Information System Essential Concept and Application* (4th ed.). New York - USA: John Willey & Sons Inc.

Yesinia, Nur Ida, Norita Cotra Yuliarti, dan dania Puspitasari. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(01).

Yudianto, Ivan, dan Ekasari Sugiarti. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Skripsi.* Jawa Barat: Universitas Padjajaran.